

1.1. Latar Belakang.

Secara filosofis dalam berbagai pola pembangunan perkebunan, Pemerintah, Perusahaan dan Rakyat merupakan subjek agraria yang paling hakiki. Pemerintah memiliki otoritas mengikat dan memaksa sebuah kebijakan, serta pihak swasta yang memiliki kemampuan manajemen dan keuangan serta teknologi, serta rakyat yang banyak menguasai agraria secara komunal dan berhubungan langsung dengan bumi dan air.

Argumentasi di atas diperkuat oleh realitas bahwa pembangunan perkebunan yang ada di Indonesia secara umum berada di pedesaan atau di atas tanah-tanah baik yang semula atau sedang dikuasai rakyat yang bukti otentiknya memang tidak kuat. Akan tetapi telah lama dikuasai dan diusahakan rakyat. Sedangkan pemerintah ada yang menegaskan hak rakyat terhadap tanah-tanah pedesaan yang luas dan sebahagian besar tanah pedesaan dikokohkan pemerintah dengan memberikan hak penguasaan dan pengusahaan perusahaan swasta yang berinvestasi di sektor perkebunan. Kondisi ini selalu berujung dengan konflik agraria. di Indonesia pembangunan perkebunan selalu diwarnai konflik, mulai dari konflik kepemilikan tanah yang dijadikan perkebunan oleh swasta, tentang harga hasil perkebunan, distribusi hasil kebun, pelunasan hutan rakyat jangka panjang.

Konflik-konflik yang terjadi inilah memberikan indikasi bahwa pembangunan yang mempertemukan hak kepemilikan masing-masing menjadi bersama kemudian dalam utilitasnya dieksploitasi oleh pihak tertentu dan tidak menguntungkan semua pihak secara proporsional, berdampak kepada terganggunya bahkan stagnan, terhentinya pembangunan perkebunan dan proses produksi kebun, sehingga mekanisme pembangunan berkelanjutan yang akan memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi kepada pihak-pihak yang termasuk ke dalam sistem itu sulit diwujudkan. Penelitian ini menganalisis pembangunan perkebunan khususnya dari aspek agraria dimana berdasarkan kepada sistem pembangunan perkebunan yang berbasikan pengembangannya pada agraria dapat memberikan kemanfaatan maksimal kepada subjek agraria yang terkait.

Ketiga subjek agraria memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, akan tetapi sebuah sistem akan berjalan jika sub sistem yang merupakan komponennya saling memberi dan menerima (hubungan resiprocal), dimana kuasa politik, kuasa ekonomi dan penguasaan lahan berlansung secara sustainability sebagaimana hubungan saling membutuhkan secara terus menerus.

Pemerintah memiliki kewenangan melahirkan kebijakan, kebijakan yang menguntungkan semua subjek agraria baik Perusahaan swasta maupun Rakyat. *Out-Come* kebijakan pembangunan perkebunan akan kembali ke pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara. Perusahaan memiliki, modal, teknologi dan barang modal lainnya, mereka hadir dalam sekema pembangunan yaitu mendapatkan keuntungan dari usahanya dan berpartisipasi kepada rakyat di lingkungan perkebunan yang disebut masyarakat perkebunan.

Rakyat di pedesaan sebagai subjek agraria memiliki Aset tenaga kerja dan aspek agraria (tanah,air dan udara) pedesaan yang telah didiami sejak nenek moyang mereka. Rakyat pedesaan diwilayah perkebunan merupakan bagian yang terintegrasi kedalam wilayah pembangunan perkebunan.

1.2 Perumusan Masalah.

Namun apakah model pembangunan perkebunan dalam pola kemitraan yang ada , dimana subjek agraria yaitu Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Rakyat yang telah memberikan kontribusi bagi terciptanya pembangunan perkebunan sehingga berlakunya model Inti-Plasma, juga diiringi mendapatkan manfaat kepada subjek agraria (Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Rakyat) dalam kemitraan pembangunan perkebunan yang terlibat secara

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan hipotesis bahwa ada hubungan signifikan antara luas lahan yang dikelola, model pengelolaan lahan, kondisi fisik tanah yang dikelola dan konversi lahan dengan tingkat produksi/ penghasilan bersih petani dengan berbagai pola perkebunan baik pola kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat maupun perkebunan yang diolah secara swadaya oleh masyarakat.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi konsep pembangunan perkebunan berbasis subjek agraria di Propinsi Riau memberikan kemanfaatan secara nyata bagi para petani. Mengidentifikasi konsep/model pembangunan baru dengan cara mengintegrasikan ketiga subjek agraria dalam pembangunan perkebunan yaitu Pemerintah-Perusahaan Besar Swasta dan Rakyat dalam sebuah sistem pembangunan.

1.4.Manfaat Penelitian